

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Definisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* merupakan taktik atau cara yang digunakan oleh pemimpin perang untuk memenangkan suatu peperangan, dari sistem posisi atau taktik perang. Strategi dalam artian umum memiliki makna sebuah siasat untuk digunakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1989, memiliki arti ilmu dan seni yang memakai segala sumber daya bangsa untuk menjalankan kebijakan tertentu dalam perang dan damai.¹ Kata strategi menurut Arnold Steinberg, yaitu rencana untuk tindakan. Proses penentuan rencana seorang pimpinan berfokus pada tujuan jangka panjang partai dan menyiapkan cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut disebut strategi. Strategi juga dapat dipahami sebagai tindakan inkremental (selalu meningkat) dan berkesinambungan, mengingat apa yang diantisipasi partai di masa depan.²

Strategi menurut William F. Glueck dan Lawrence Jauch, yang memaknai strategi merupakan suatu siasat yang disatukan, luas dan terintergritas. Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia mengartikan strategi adalah ilmu perang. Strategi menurut Prawira adalah langkah untuk menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu atau sebuah siasat paten untuk suatu kegiatan dimana di dalamnya berisi formulasi tujuan dan kumpulan rencana kegiatan.³ Suatu strategi harus mempertimbangkan segala kegiatan yang melibatkan pengintegrasian unsur-unsur urutan kegiatan, cara mengatur kegiatan, peralatan, serta jumlah waktu yang dihabiskan untuk

¹ Fatimah and Ratna Dewi Kartika Sari, "Strategi Belajar & Pembelajaran Dalam Meningkatkan Keterampilan Bahasa," *Pena Literasi : Jurnal PBSI* 1, no. 2 (2018): 109.

² Sutanto, "Strategi Partai Demokrat Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Semarang" (Universitas Negeri Semarang, 2011), 12.

³ Yusnimar Yusri, "Strategi Pembelajaran Andragogi," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 12, no. 1 (2017): 27.

proses kegiatan agar efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

Strategi adalah alat yang digunakan untuk mendayagunakan tenaga, dana, sumber daya dan peralatan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada intinya, tujuan dari strategi adalah untuk membentuk kondisi masa depan sesuai dengan harapan atau tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai pendekatan atau metode yang direncanakan. Strategi memiliki kerangka atau model untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu, pada dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Strategi didefinisikan sebagai proses mendefinisikan rencana oleh para pemimpin senior yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan metode atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi yang dirancang dengan baik membantu mengatur dan mendistribusikan sumber daya perusahaan dengan yang unik dan berkelanjutan.⁵

Menurut De Bruycker dan Roodujin menjelaskan 5 definisi strategi yang terdiri dari strategi merupakan sebuah rencana (plan), pola (pattern), posisi (positions), permainan/taktik (play) dan sebagai perspektif (perspective). Pertama, strategi sebagai rencana merujuk pada program aksi yang dirancang untuk mencapai serangkaian tujuan yang telah ditentukan. Ini dikenal sebagai strategi perencanaan. Kedua, strategi sebagai pola merujuk pada pola perilaku masa lalu yang konsisten dan tidak berubah. Dalam melaksanakan strategi, kesadaran semua pihak yang terlibat sangat penting. Ketiga, strategi sebagai posisi merujuk pada cara atau langkah dalam menetapkan merek, produk, atau posisi perusahaan di pasar. Keempat, strategi sebagai taktik merujuk pada serangan yang direncanakan untuk memperdaya atau memukau pesaing. Kelima, strategi sebagai perspektif merujuk pada langkah dalam melaksanakan strategi berdasarkan teori dengan menggunakan pemikiran yang rasional atau ideologis.⁶

⁴ Sutanto, "Strategi Partai Demokrat Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Semarang", (Universitas Semarang, 2011), 12.

⁵ Saifi Bayu Pradana, "Strategi Pemberdayaan Wirausaha Melalui Aplikasi Market Place Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Langgar Dalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus" (2023): 12, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

⁶ Triwicaksono and Nugroho, "Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah.", *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5, No.1, (2021): 138

2. Definisi Memperoleh

Kata “memperoleh” merupakan turunan dari kata “peroleh”. Dalam bahasa Indonesia, kata peroleh merupakan bentuk dasar dari kata kerja yang berarti mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Kata memperoleh memang tidak spesifik dijelaskan tentang memperoleh, melainkan melalui bahasan lain. Misalnya “memperoleh” dalam kontes Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu pekerjaan, kata “memperoleh” merujuk pada proses dimana karyawan mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman melalui program pengembangan SDM dalam pekerjaan. Ketika kata “peroleh” diawali dengan “mem-”, kata tersebut menjadi kata kerja yang menunjukkan tindakan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu, seperti “memperoleh pengetahuan” atau “memperoleh keuntungan”. Jadi kata memperoleh merupakan bentuk kata kerja dari “peroleh” yang menggambarkan aksi atau proses memperoleh sesuatu.⁷

Dalam penelitian sebuah partai politik maka, dalam pesta demokrasi lima tahun sekali atau disebut dengan pemilu, biasanya partai politik melakukan serangkaian pendekatan dan komunikasi antar masing-masing guna memperoleh hati masyarakat yang dimana pada saat itu akan melakukan strategi politik untuk menarik simpatik masyarakat.⁸ Artinya adalah kata “Memperoleh” di penelitian parta politik akan membahas tentang mendapatkan dukungan masyarakat. Atau dalam konteks lain, seperti kelembagaan legilatif maupun eksekuti dalam sebuah pemerintahan diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilu dengan mendapatkan kemenangan. Artinya adalah kata “diperoleh” memiliki arti mendapatkan kekuasaan dalam kelembagaan legislatif maupun eksekutif.⁹

Dapat disimpulkan bahwa kata “memperoleh” merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu. Dalam

⁷ Hendita Yosepa, Acep Samsudin, and Asep Muhammad Ramdan, “Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Tingkat Etos Kerja Karyawan Pada Hotel Santika Sukabumi,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 3 (2020): 742.

⁸ Ramco Yudi Gustiarto, “Strategi Peningkatan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Provinsi Lampung” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), III.

⁹ Zainun Akbar, “Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017)” (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018): 106.

politik “memperoleh” memiliki makna yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan dukungan atau suara dari masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan dan memperoleh kekuasaan atau posisi tertentu dalam pemerintahan atau partai politik. Dalam konteks politik, “memperoleh” memiliki arti penting karena dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mencapai tujuan politiknya.

3. Strategi Partai Politik dalam Pemilu

Dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, partai politik menyediakan sarana partisipasi politik bagi individu dalam demokrasi konstitusional. Sementara itu, pemilu memberikan ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh sistem pemilu dan berbagai partai, khususnya partai politik itu sendiri, agar berhasil mempersiapkan pemilu:

- a. Keterwakilan seluruh kelompok masyarakat dalam lembaga perwakilan, khususnya kelompok minoritas.
- b. Representasi dalam keadilan (equity) mengacu pada strategi yang menunjukkan kekuatan politik dan kepentingan masyarakat dalam lembaga perwakilan.
- c. Representasi dimana individu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pemilihan kandidat; Hubungan antara pemilih dan rakyat yang menjadi bagian dari lembaga yang mewakili rakyat terjalin.

Sejauh mana sistem pemilu merupakan sistem politik yang stabil akan menjadi faktor penentu efektivitas sistem pemilu. Karena publik mengharapkan pemilu secara signifikan meningkatkan stabilitas pemerintahan dan legitimasi representasi politik, serta demokrasi itu sendiri. Partai politik yang bersifat pragmatis telah berdiri selama 32 tahun tanpa menggunakan ideologi sebagai alasan pembentukannya. Dimana para politisi yang menyimpang dan tidak membawa pesan rakyat seringkali tidak konsisten dengan janji dan perilaku politiknya. Bahkan fungsi partai politik sebagai komponen sistem politik demokrasi tidak lagi terlihat. Partai politik, sebaliknya, harus mampu mengelola potensi konflik, menawarkan alternatif politik bagi permasalahan bangsa, dan menjaga saluran komunikasi tetap

terbuka agar masyarakat dapat terhubung dengan proses politik secara sehat dan bermakna.¹⁰

Partai politik pun harus memiliki strategi dalam memperthankan namanya agar tetap eksis dikalangan masyarakat saat ada pemilu ataupun tidak. Karena partai politik merupakan sarana aspirasi masyarakat sebagai bukti demokrasi di Indonesia. Partai politik agar tetap bertahan dan unggul dalam memperoleh suara harus memiliki strategi, secara umum beberapa strategi partai politik dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Strategi Komunikasi

Dalam ilmu komunikasi, menurut Supriyatno Komunikasi adalah proses memadukan Maarek berpendapat bahwa komunikasi mempunyai tujuan untuk menciptakan kepentingan bersama, mencapai kestaraan, keadilan, keharmonisan dan kehidupan yang damai. Komunikasi berasal dari kata latin *Communis* atau *common* dalam bahasa inggris mempunyai arti yang sama yaitu komunikasi adalah sebuah usaha bersama untuk mencapai kesamaan makna. *Commones*, memiliki makna bahwa dari komunikasi seseorang berusaha untuk berbagi informasi, gagasan atau sikap. Hepp menggambarkan bahwa ilmu komunikasi adalah usaha sistematis untuk merumuskan dengan tegas prinsip-prinsip penyampaian informasi sarta pembentukan opini sikap.¹¹

Menurut definisi Abdullah, Strategi Komunikasi Politik adalah sebuah taktik yang mencakup metode, teknik, dan hubungan fungsional antara unsur dan faktor proses komunikasi untuk kegiatan operasional untuk mencapai maksud dan tujuan. Strategi komunikasi politik adalah tentang bagaimana proses komunikasi untuk mencari sebuah cara dalam menentukan teknik dalam

¹⁰ Lindawati, D. S., Strategi partai politik dalam menghadapi pemilu 2014. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 4, No.2, (2013): 289.

¹¹ Muhamad Farhan, “Strategi Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember Menjelang Pemilukada Jawa Timur 2018,” *Al’Adalah* 22, no. 1 (2019): 3, <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6><https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2><https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019><https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014><http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041><http://arxiv.org/abs/1502.020>.

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bersama, yang artinya strategi komunikasi dalam partai politik dengan masyarakat bertujuan untuk menentukan aturan tertentu untuk membangun suatu daerah yang lebih baik.¹²

Strategi Komunikasi menurut Johnson dan Edi menjelaskan bagaimana komunikasi mampu meningkatkan perkembangan intelektual dan sosial setiap individu. Salah satu kunci partai politik dalam memenangkan pemilu adalah strategi komunikasi politik. Kampanye adalah salah satu contoh komunikasi politik. Kampanye adalah teknik yang digunakan oleh individu, kelompok atau organisasi untuk membentuk dan membangun citra serta opini publik yang positif, dengan tujuan memenangkan pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.¹³

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai penyalur segala pendapat dan aspirasi rakyat, selain itu partai politik juga sebagai perantara pemerintah dengan rakyat dalam menyebarkan rencana dan kebijakan pemerintah, maka pemerintah dan rakyat dapat saling berkesinambungan dengan perantara partai politik. Selain sebagai perantara komunikasi pemerintah dengan rakyat, strategi komunikasi juga diperlukan untuk kelangsungan anggota-anggota partai politik.¹⁴

Partai politik dalam meraih kekuasaan melalui kedudukannya dalam parlemen, maka partai politik harus mampu mendapatkan dukungan masyarakat. Setidaknya ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pertama adalah partai politik

¹² Harold Y. Pattiasina, "Strategi Komunikasi Politik Pdi Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah Pada Pemilu 2014," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 19, no. 1 (2015): 20. <https://media.neliti.com/media/publications/124232-ID-strategi-komunikasi-politik-pdi-perjuang.pdf>.

¹³ Syahrial Syarbaini, Syurya Muhammad Nur, and Erman Anom, "Teori , Media Dan Strategi Komunikasi Politik" (Fakultas Ilmu Komunikasi Esa Unggul University, 2021), 23..

¹⁴ Aditya Putra, "Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemula (Studi Kasus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare)," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 26, no. 1 (2020): 58. .

harus mampu mendapatkan kepercayaan dari warga kecil, tidak memungkiri bahwa dukungan dari masyarakat kecil memiliki pengaruh besar terhadap kemenangan partai politik. Kedua, menguatkan sistematis kelompok serta kandidat partai. Ketiga, menerapkan program yang mampu mengikat masyarakat, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap partai tanpa dengan janji-janji yang kurang realistis. Keempat, memperluas dukungan dari wiraswasta, aparat atau elit politik pengaruh dalam suatu daerah. Yang terakhir adalah memodifikasi sistem kepengurusan yang resmi normatif menjadi aplikatif, sehingga mampu memicu sikap aksi untuk mendorong partai politik.¹⁵

Salah satu bentuk komunikasi antara legislatif dengan masyarakat dalam membangun suatu daerah adalah adanya reses. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja rutin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib bertemu secara rutin dengan konstituennya setiap reses. Ensiklopedia Nasional Indonesia menjelaskan bahwa “reses” dalam arti aslinya adalah masa istirahat atau berakhirnya sidang atau sidang badan perwakilan rakyat dan badan sejenisnya. Kegiatan reses itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilakukan anggota DPRD, yakni komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja rutin. Anggota DPRD wajib bertemu secara rutin dengan konstituennya setiap masa reses. Peserta reses tersebut adalah seluruh lapisan masyarakat, antara lain: Camat, TNI/Polri, Pimpinan Puskesmas, dinas setempat seperti Lurah/Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Kepala Dusun. Kelompok Masyarakat, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan lainnya yang tentunya seluruh unsur masyarakat yang bisa memberikan masukan atau

¹⁵ Pattiasina, “Strategi Komunikasi Politik Pdi Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah Pada Pemilu 2014” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 19, No. 1, (2015), 21.

penyesuaian terhadap penyusunan program dan operasional daerah Program Pemerintah, namun biasanya anggota dewan juga memperhatikan keterwakilan pemilih anggota DPRD tersebut.¹⁶

Komunikasi dalam partai politik mampu menjadi pertimbangan partai politik itu sendiri sehingga memicu program-program terencana dari partai politik untuk masyarakat sehingga mampu mendongkrak eksistensi partai politik itu sendiri. Partai politik mampu menciptakan perubahan untuk membangun negara yang lebih maju. Partai politik diharapkan membawa perubahan yang berarti dan positif bagi bangsa. Negara demokrasi yang selama ini dinanti-nanti dapat dicapai melalui keberadaan partai politik.¹⁷

b. Strategi Kaderisasi

Kaderisasi, menurut kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses metode yang melibatkan pengajaran atau penyusunan seseorang ke dalam suatu kerangka kerja. Sedangkan Kader adalah orang-orang yang siap mengambil alih tugas dan fungsi strategis dari pendahulunya. Menurut Nawawi pengkaderan adalah sebuah proses tindakan yang didalamnya terdapat kegiatan mendidik serta membentuk individu menjadi kader. Menurut Parpanto dan Dahlan tentang pengkaderan adalah penyiapan individu untuk melanjutkan tongkat estafet suatu organisasi, calon tunas muda atau generasi muda.¹⁸ Kaderisasi dalam Islam digambarkan sebagai upaya mempersiapkan calon-calon pemimpin yang intelektual dan jujur, matang dalam membangun dan tangguh dalam menjaga dan mengembangkan jati diri umat, sebagai umat yang

¹⁶ Erika Sisilia Wenas, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas, "Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon," *Jurnal Governance*, vol.1, no. 2 (2021): 4.

¹⁷ Rosana, E. (2012). Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 8, No. 1, 135.

¹⁸ Didik Muhammad Aji, "Strategi Pengkaderan Pada Pendidikan Dasar Ulama Di Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021): 12, [https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/57241/1/1116011000008_Didik Muhammad Aji - Didik Muhammad Aji.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/57241/1/1116011000008_Didik%20Muhammad%20Aji%20-%20Didik%20Muhammad%20Aji.Pdf).

bertakwa kepada Allah SWT.¹⁹ Artinya persepsi tentang kaderisasi adalah sebuah proses penyiapan kader untuk melanjutkan perjuangan pendahulu.

UU Partai Politik Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan, dalam Bab XI Pasal 29 Ayat (2). Dalam proses rekrutmen, setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur unik yang penting. Dijelaskan dalam pasal 98 bab 12 Kaderisasi dalam AD/ART PKB. Sementara itu, Ramlan Surbakti memberikan penjelasan tentang rekrutmen politik, yaitu memilih dan mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk berperan dalam sistem politik negara dan sistem politik pada umumnya. Dia berfokus pada pemilihan individu dengan bakat yang agak menonjol dan menempatkan mereka dalam pemilihan. Kepemimpinan di daerah, baik domestik maupun internasional, sangat penting bagi kelangsungan sistem politik karena kelangsungan sistem politik jangka panjang tergantung pada kemampuan elit politik untuk menjalankan tugas mereka di kantor.²⁰

Partai politik agar tetap bertahan tentunya membutuhkan regenerasi anggota dan mengisi kepemimpinan nasional dengan rekrutmen. Kaderisasi partai politik yang setara dan adil terhadap gender dan memperhatikan kredibilitas individu. Sama halnya dengan pemilu, setaip aturan mengenai jalannya pemilu di Indonesia yang berjalan setiap 5 tahun sekali baik menggunakan sistem proposional terbuka maupun tertutup haruslah mencari anggota yang kompeten. Rekrutmen anggota tidak bisa asal-asalan karena anggota yang berkompeten, berdedikasi, dan terintegritas

¹⁹ Agus Muchsin, "Kaderisasi Fuqaha Dalam Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, no. 2 (2010): 209.

²⁰ Alfi Zahrinna, "Strategi Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik" (2022): 18.

mungkin akan terpilih dan duduk dalam parlemen negara.²¹

Sesosok figur dalam pengkaderan juga harus diperhatikan, kekuatan figur mampu mempengaruhi eksistensi partai politik dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu karisma dan finansial tokoh. Kekuatan figur mampu menjadi kekuatan penting bagi partai politik. Sedangkan yang menjadi latar belakang figur tersebut untuk menjadi kekuatan partai politik bisa dilihat dari karismatiknnya, karisma dari figur tersebut mampu menarik massa sebanyak-banyaknya. Kekuatan yang kedua adalah finansial, dalam menjalankan sebuah organisasi atau partai politik tentunya membutuhkan dana yang tidak terbilang kecil, dengan figur yang memiliki finansial mumpuni mampu menjadi penyokong keberlangsungan partai politik.²²

c. Strategi Sayap Partai Politik

Partai politik merupakan sebagai wadah untuk sekelompok orang dengan cita-cita yang sama untuk memenangkan kursi pemerintahan negara untuk memperjuangkan dan membela aspirasi anggota masyarakat, negara dan bangsa. Partai politik memiliki peran penting untuk negara demokratis. Sependapat dengan pendapat Jimly Asshiddique yang berpendapat bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi karena perannya sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dengan pemerintah. H. Uu Nurul Huda juga berpendapat bahwa adanya partai politik digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab dari berbagai negara, sesuai dengan peran partai politik tentunya diperlukan kelembagaan dalam setiap sistem politik yang demokratis.²³ Menurut Muhammad Ridha T.R dari pendapat Minwaring dan Scully yang

²¹ Wijayanti and Iswandi, "Peran Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia.", Vol.27, No. 4, (2021) : 483.

²² Ridoi, "Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid Di Partai Kebangkitan Bangsa)." (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016): 59.

²³ Marojahan JS Panjaitan, "Fungsi Dan Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik Dengan Partai Politik Di Indonesia" (n.d.): 5, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

berpendapat bahwa kelembagaan partai politik merujuk pada empat dimensi sistem institusionalisasi partai, yaitu:

1. Stabilitas persaingan partai, adanya persaingan partai tanpa dukungan institusional meningkatkan volatilitas pemilu.
2. Partai yang mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat berarti mempunyai zona pendukung inti yang tidak berubah pada setiap pemilu dan mempunyai struktur yang mengikat. Akar partai politik masyarakat harus konsisten dengan program dan struktur yang jelas dan dapat diterima secara sosial serta melibatkan hubungan antara partai dan pemilihnya. Melemahnya hubungan struktural antara partai dan pemilih menjadi salah satu faktor yang berpotensi melemahkan akar partai di masyarakat.
3. Adanya legitimasi subjek atau aktor politik terhadap partai, aktor politik mengerti bahwa partai memiliki peran penting untuk negara demokrasi.
4. Partai politik dianggap terlembaga jika keorganisasian partai tidak dikuasai oleh pemimpin-pemimpinnya yang memiliki kepentingan. Proses kelembagaan akan sangat terbatas jika hanya strukturnya berfokus pada satu pemimpin saja.

Artinya dengan adanya perlambagaan dibawah partai tentunya adanya keterbukaan antara partai politik dengan masyarakat dari keterbukaannya dengan struktur, nama jelas, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), tujuan serta kedudukan hukum partai politik itu sendiri.²⁴

Dukungan organisasi sayap. Mengingat arti penting dan strategisnya, organisasi sayap partai politik mejadi fokus utama seluruh partai politik Indonesia. Tidak mungkin partai politik tidak memiliki organisasi cabang karena desain sistem partai nasional. Undang-Undang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2008 berupa UU No. Pasal 12 Huruf j, yang mengatur bahwa partai politik berhak membentuk atau memiliki organisasi cabang dari partai politik, berlaku efektif 2 Februari 2011. Pasal 12

²⁴ Ridoi, *"Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid Di Partai Kebangkitan Bangsa)."*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:2016): 18.

huruf j menjelaskan jika mengacu pada organisasi sayap partai politik "Organisasi sayap partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan peraturan internal (ART) partai politik". Dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi politik hukum undang-undang partai memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki sayap organisasi sebagai wadah dan saluran komunikasi dengan massa dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut. 12 huruf j dan penjelasannya. Sebab, partai politik bebas membentuk dan mengendalikan sebanyak mungkin cabang organisasi yang diinginkannya.²⁵

UU Nomor 2 Tahun 2008 tampak bahwa pembentukan organisasi sayap partai politik itu ada 2 cara, yaitu :

- i. Organisasi sayap partai politik dibentuk secara langsung oleh partai politik.
- ii. Organisasi sayap partai politik tidak dibentuk secara langsung oleh partai politik.

4. Perilaku Pemilih

Perilaku politik termasuk perilaku memilih dalam pemilu. Menurut Samuel P. Huntington, perilaku memilih dan partisipasi politik tidak dapat dipisahkan. Ada banyak cara untuk terlibat dalam politik. Kegiatan pemilihan meliputi pemungutan suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, berpartisipasi dalam pemilihan, mendukung seorang kandidat, dan tindakan lain yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan. Mahendra, perilaku pemilih adalah ketika seseorang memilih calon, partai politik, atau isu-isu publik tertentu. Setelah itu, Kristiadi yang juga dikenal dengan teori behavioral voting mendefinisikan perilaku pemilih sebagai keterikatan seseorang untuk memilih dalam proses pemilihan umum yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu²⁶ :

²⁵ Wijayanti and Iswandi, "Peran Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia.", *Jurnal Sasi*, Vol 27, No. 4, (2021): 474

²⁶ Ardhi Kurniawan, "Analisis Perilaku Pemilih Pada Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014," (Repository Brawijaya : 2017): 22.

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologis pertama kali dikembangkan oleh Biro Ilmu Sosial Terapan Universitas Kolombia (*Colombia's University Bureau of Applied Social Science*), atau lebih sering disebut sebagai kelompok Kolombia. Itu berasal dari Eropa tetapi kemudian dikembangkan di Amerika Serikat. Pertemuan ini memimpin penelitian tentang pemungutan suara pada tahun 1948 dan 1952. Studi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti status sosial ekonomi, etnis, riwayat keluarga, keanggotaan dalam organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lokasi berdampak pada perilaku memilih seseorang. Agama, pendidikan, jenis kelamin, faktor geografis, budaya, dan faktor sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan memilih.

b. Pendekatan Psikologis

Pusat Penelitian Survei Universitas Michigan adalah yang pertama menggunakan strategi ini, oleh karena itu dinamai "*grup Michigan*". *The Voter's Decide (1954)* dan *The American Voter (1960)* adalah dua studi terkenal dari kelompok ini. Ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis menyebabkan berkembangnya pendekatan ini. Metode sosiologis dianggap kurang efektif dalam menjelaskan tren sosial secara metodologis. Misalnya, sulit untuk memastikan kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan orang dan alasan mengapa suatu kelompok mendukung atau memilih partai politik tertentu. Hal ini bisa terjadi karena aliran sosiologi hanya berbicara tentang bagaimana kelompok masyarakat cenderung memihak kepada pihak tertentu. Selain itu, kelas sosial dan partai politik tertentu cenderung kehilangan dominasi absolut mereka satu sama lain dari waktu ke waktu. Mazhab ini mengatakan bahwa keterikatan seseorang dengan partai politik, orientasi terhadap calon anggota parlemen, dan orientasi terhadap masalah politik semuanya berperan dalam pengambilan keputusan mereka.

c. Pendekatan Rasional

Terdapat pengaruh situasi yang menjadikan pilihan politik seseorang ketika memahami pendekatan rasional. Pemilih tidak terpengaruh karena adanya

ikatan sebuah karakter sosiologis namun bebas bertindak, baik pasif maupun aktif. Masalah politik atau kandidat yang dipertimbangkan adalah dua contoh faktor situasional. Menurut Firmanzah, pemilih adalah semua pihak yang tujuan utamanya mempengaruhi dan membujuk pemilih untuk mendukung dan kemudian memilih kandidat tersebut. Dalam hal ini, pemilih bisa merupakan konstituen atau masyarakat secara keseluruhan. Konstituen adalah sekelompok orang yang percaya bahwa mereka diwakili oleh ideologi yang tercermin dalam partai politik dan lembaga lainnya. Seperti yang dikemukakan Prihatmoko, pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan tidak boleh menjadi anggota salah satu partai politik. Terdapat berbagai macam golongan dalam masyarakat. Kelompok non-partisan terdiri dari individu-individu yang tujuan dan ideologi politiknya tidak diwakili oleh satu partai politik.

Sementara itu, menurut Fatah²⁷ pemilih umumnya terbagi dalam empat kelompok utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilih Rasional Kalkulatif adalah kategori pemilih yang membuat keputusan politiknya berdasarkan penalaran dan perhitungan yang sehat. Pemilih ini biasanya berasal dari kelompok individu berpendidikan atau agak berpendidikan yang memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan.
- 2) Pemilih Primordial, Pemilih yang lebih mendasarkan keputusannya pada faktor fundamental. karena agama, suku, atau keturunan mereka. Pemilih seperti ini biasanya sangat bangga dengan simbol yang mereka yakini mulia. Mayoritas pemilih ini tinggal di desa.
- 3) Pemilih pragmatis biasanya lebih dipengaruhi oleh pertimbangan untung rugi. Kandidat yang berpotensi menguntungkan mereka secara pribadi

²⁷ Marwan Rinaldy Rantelore, Ronny Gosal, and Alfon Kimbal, "Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Poso Studi Di Kecamatan Pamona Selatan," *Journal Eksekutif* Vol. 2, No. 2 (2017): 11.

untuk sesaat akan menerima suaranya. Dalam kebanyakan kasus, mereka juga tidak terlalu peduli dengan integritas, visi, atau misi kandidat dan bahkan tidak kritis terhadapnya.

- 4) Pemilih yang diinvestasikan secara emosional cenderung mendasarkan keputusan politik mereka pada perasaan pribadi. Keputusan emosional termasuk, misalnya, pilihan politik berbasis kasih sayang. Pilihan emosional juga mencakup keputusan yang dibuat karena alasan romantis, seperti terpesona oleh kecantikan atau ketampanan kandidat. Mayoritas dari mereka biasanya adalah perempuan atau pemilih pemula.

Menurut Surbakti²⁸, ada beberapa cara untuk menentukan mengapa pemilih memilih calon tertentu dalam pemilihan, antara lain:

- 1) Pendekatan struktural melihat pemungutan suara sebagai produk dari konteks struktural yang lebih luas, seperti sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, isu dan program yang diajukan masing-masing partai serta struktur sosial (struktur sosial yang menjadi cikal bakal politik). Pluralisme dapat berupa kelas sosial, agama, bahasa dan nasionalisme.
- 2) Metode sosiologi yang cenderung mengaitkan kegiatan pemungutan suara dengan konteks sosial. dimana faktor demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan agama mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilihan umum.
- 3) Pendekatan ekologis yang hanya berguna jika karakteristik pemilih berbeda di suatu daerah pemilihan berdasarkan unit teritorial.
- 4) Pendekatan psikologi sosial melibatkan pemilihan pihak berdasarkan kedekatan emosional, tanpa mempertimbangkan faktor lain.

²⁸ Ori Hapsari Kaesmetan Tri, "Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan," *Journal KPU*, no. 1 (2019): 14.

- 5) Voting dipandang sebagai hasil perhitungan untung rugi dengan pendekatan pilihan rasional.

5. Partai Politik

Asal usul kata Partai Politik berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani yang berarti kota atau negara. Kemudian kata *polis* berubah menjadi *politie* yang berarti warga negara, dan *politike te ckne* yang berarti ketrampilan politik serta *politike episteme* yang berarti ilmu politik. Secara umum, istilah politik mengacu pada upaya untuk mencapai ideologi atau tujuan tertentu. Aristoteles merupakan orang yang pertama mengenalkan politik. Aristoteles mengartikan politik merupakan gambaran tentang manusia sebagai binatang politik. Aristoteles menjelaskan bahwa politik akan terlibat dalam kehidupan sosial manusia baik interaksi antar dua orang maupun lebih yang artinya adalah semua individu adalah politisi. Menurut Aristoteles, interaksi politik merupakan satu-satunya cara dalam mendukung kemampuan individu untuk mencapai kesepakatan dalam memecahkan masalah sosial dengan orang lain bahkan pada unit kelembagaan yang terbentuk secara kolektif oleh suatu negara. Semua individu adalah politisi, meskipun secara umum pejabat negaralah yang paling terlihat melakukan kegiatan politik.²⁹

Partai politik dalam teori ilmu politik merupakan sebuah alat yang dirancang oleh manusia yang disebut mampu mewujudkan tujuan politiknya. Mengingat kepeningan partai politik itu sendiri, maka tidak mengherankan jika menimbulkan ungkapan “politisi modern tanpa partai politik seperti memancing keluar air”. Sebagai tempat yang mewadahi aspirasi rakyat, partai politik memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat dalam upayanya untuk memenangkan pemerintahan Indonesia. Pembentukan partai politik merupakan bentuk kedaulatan rakyat, sehingga semangat kebebasan rakyat menjadi pengontrol kekuasaan.³⁰

Definisi partai politik menurut Carl J. Friedrich yaitu “(A political party is a group of human beings, stably

²⁹ Rosana, E. (2012). Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 8 No.1, 138.

³⁰ Nadhifatus Shofia and Moch. Zaidan Alamsyafi, “Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Masa Pra Dan Pasca Kemerdekaan,” *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 1 (2019): 63.

organized with the objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages).” Artinya adalah partai politik yaitu sekelompok orang yang terorganisir dengan baik untuk bersaing memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan manfaat baik secara ideologis maupun materiil bagi anggota.

R.H Soltau mendefinisikan partai politik sebagai berikut “*A group of citizens more or less voting power, aim to control the government and carry out their general policies.*” Artinya yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari sejumlah rakyat negara yang terorganisir dengan baik. Bergerak sebagai satu kesatuan politik untuk memanfaatkan kekuasaan dengan tujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Menurut Sigmund Neuman dalam karyanya yang berjudul “*Modern Political Parties*” mendefinisikan partai politik adalah sebuah organisasi yang terdiri dari aktivitas-aktivitas politik dengan tujuan untuk memenangkan pemerintahan dan mendapatkan dukungan massa melalui persaingan dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda.³¹ Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah sebuah organisasi yang tersusun dimana anggotanya memiliki pemikiran, cita-cita dan nilai yang sama. Tujuan dari organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan mengambil kekuasaan dengan kursi konstitusional agar mampu menjalankan kebijaksanaan mereka. Dalam garis besar tentang teori partai politik dari para pakar hampir sama dengan apa yang telah dimaksudkan Miriam Budiarjo, yang pada dasarnya partai politik adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan. Miriam Budiarjo mengelompokkan partai politik menjadi empat tipe³²:

- 1) Partai Lindungan (Patronage Party), secara umum adalah organisasi nasional atau lokal dengan aturan yang longgar

³¹ Natalia, A., Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11, No. 1, (2015), 54.

³² Ahmad Gelora Mahardika and Sun Fatayati, “Perubahan Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia” 30 (2019): 247.

akan cenderung memiliki disiplin yang lemah dan kurang memprioritaskan pembayaran iuran secara teratur. Tujuan utama dari organisasi semacam ini hanyalah untuk memenangkan kemenangan bagi anggotanya dalam pemilihan umum, sehingga biasanya lebih aktif ketika pemilihan sudah dekat.

- 2) Partai Ideologi atau Partai Asas (seperti fasisme, kristen-demokrat, sosialisme komunisme). Partai politik jenis ini memiliki pandangan hidup yang telah ditetapkan dalam kebijakan pimpinan dan mengikuti disiplin partai yang kuat dan mengikat. Partai Massa memiliki keunggulan dalam jumlah anggota yang besar, sehingga mampu mendapatkan dukungan dari berbagai aliran politik dan masyarakat yang memiliki tujuan program yang luas dan tidak jelas.
- 3) Partai Kader, fokus utama dari partai politik ini adalah kekuatan organisasi dan disiplin kerja dari anggotanya. Pemimpin partai biasanya mempertahankan kemurnian doktrin partai politik dengan melakukan seleksi ketat terhadap calon anggota dan mengeluarkan anggota yang menyimpang dari garis partai yang telah ditetapkan.

Partai politik merupakan alat satu bentuk demokrasi. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa dalam sebuah belum bisa dikatakan demokratis jika tidak mampu melibatkan partai politik. Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi mampu diibaratkan dengan kebutuhan ilmiah dari demokrasi. Menurut Max Weber mengatakan bahwa hal tersebut merupakan anak-anak demokrasi. Posisi partai politik dalam demokrasai yang khas, merupakan dasar dari demokrasi yang menjadikan masyarakatnya untuk ikut terlibat dalam pemerintahan Indonesia secara menyeluruh untuk warga negara, dan partai politik merupakan salah satu wadahnya.³³

Perlu ditekankan, bahwa partai politik tidak sama dengan gerakan (*movement*), gerakan adalah golongan atau kelompok yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan di lembaga politik atau bahkan menciptakan tata masyarakat yang baru menggunakan strategi politik. Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau

³³ Firman Noor, *Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi Di Indonesia Era Reformasi : Kajian Penyebab Dan Solusianya*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2018: 1.

sering disebut dengan kelompok kepentingan (*interest group*), karena kelompok tersebut memiliki tujuan memperjuangkan kepentingan kelompok saja serta mempengaruhi lembaga-lembaga politik dengan cita-cita untuk mendapatkan sebuah kebijakan yang memiliki keuntungan dan menghindari keputusan yang membuat mereka rugi.³⁴

6. Partai Politik dalam Islam

Partai politik dalam Islam merujuk pada istilah dalam Al-Qur'an, kata partai adalah *hizb*. Istilah *hizb* secara harfiah tidak memiliki arti partai, melainkan pemaknaan pertama adalah komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. Kedua, suatu kumpulan yang mempunyai rasa persaudaraan dan juga kekuatan, selanjutnya adalah kader yang berpartisipasi. Dari ketiga pemaknaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partai atau *hizb* merupakan suatu kumpulan masyarakat yang menjadi satu dengan arah, sasaran dan tujuan yang satu. Kata *hizb* dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 22 :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ يَوْمَ رَأَاهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

“Dan saat orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, mereka berkata; “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Benar Allah dan Rasul-Nya.” Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan” (Q.S. Al-Ahzab ayat 22).

Kata *hizb* yang pertama dengan makna golongan dengan persamaan konsep. *Hizb* dalam Q.S Al-Ahzab ayat 22 mengandung makna golongan yang telah bersekutu dengan artian mereka bersekutu tentunya memiliki konsep pemikiran yang sama.

Selain itu juga terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 56 :

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

³⁴ labolo Muhadam And Ilham Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Strategi*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Jakarta, Rajawali Pers, 2015): 23.

“Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.” (Q.S. Al-Maidah ayat 56).

Kata *hizb* dalam surat Al-Maidah ayat 56 mengandung makna pengikut agama Allah dengan kalimat lengkap yaitu *hibullah*. Kata *hizb* dijelaskan bahwa pengikut yang artinya pemaknaan parti politik dalam ayat tersebut adalah kader atau partisipasinya *hizb* dalam percaya bahwa Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman adalah penolongnya.

Istilah Hizbullah juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 22:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan kamu mestinya tidak akan mendapati suatu kaum yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, berkoalisi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu adalah orangtua, anak, saudara atau kerabat mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan yang benar dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan dukungan-Nya, dan kelak mereka dimasukkan dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya anggota Hizbullah itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Al-Mujadalah ayat 22).

Q.S. Al-Mujadalah ayat 22 menjelaskan *hizb* adalah golongan yang memiliki ikatan dalam kekuatan dan rasa persaudaraan bersama. Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai partai politik, melainkan yang pertama adalah golongan dengan konsep pemikiran yang sama, kedua adalah partisipan atau kader sedangkan yang terakhir adalah ikatan hubungan persaudaraan.

Dalam sejarah, pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, tidak dikenal praktek partai dalam pemilihan pemimpin yang baik. Pemimpin ditentukan secara menunjuk, dimana kepemimpinan (Imamah) akan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih dan dibai'at oleh sekelompok sahabat yang dikenal dengan nama Ahl Al Halli wa Al-Aqdi. Setelah itu, rakyat akan membaiat pemimpin tersebut. Untuk pemimpin di tingkat gubernur, biasanya akan ditunjuk langsung oleh pemimpin negara tersebut.

Kasus perpecahan kaum Islam pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menurut ulama dan pakar fiqih siyasah dikarenakan adanya konflik dengan pihak Mu'awiyah di Shiffin sebagai awal baru muncul partai-partai politik dalam Islam. anggapan tentang hadirnya aliran Khawarij, Syari'ah dan Mu'taziah, setelah perang di Shiffin, berlanjut hingga muncul lagi kelompok seperti Ahlussunnah Waljamaah, Murji'ah dan lain sebagainya menunjukkan awal dari keluarnya kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik dalam Islam, walaupun dalam kasus sejarah tersebut tidak ada satupun yang menyatakan kelompoknya adalah partai politik. Mereka menganggap kelompoknya adalah kelompok yang baik dengan tujuan yang baik dan menganggap kelompoknya adalah yang terbaik dari yang lain karena setiap kelompok memiliki tujuan masing-masing. Artinya bahwa perpecahan yang terjadi bukan karena ranah politiknya, melainkan ajaran agama mereka. Hal tersebut karena mereka tidak pernah berkampanye untuk menentukan kepala negara sama seperti realita politik saat ini.

Makna Hizb dalam pengertian yang sama dengan arti partai menurut pakar siyasah, kedua kata antara hizb dan partai memiliki kesamaan. Jika ditinjau dari Al-Qur'an pada firman Allah *Kullu hizbi bima ladaihim faarihun* yang artinya adalah "Setiap golongan atau kelompok (partai) merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing". Serta firman Allah SWT lainnya yaitu *Minal laziyna farraquw minhum wakaanu syiya'a. Kullu hizbi bima ladaihimfaarihun* yang artinya adalah "Yaitu orang-orang yang memecahbelah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." Rasulullah SAW bersabda bahwa akan adanya perpecahan golongan umat Islam *Taftariqu ummati 'ala tsalatsi wa Sab'inya*

Firqatan “Ummatku akan terpecah belah kepada 73 kelompok”.

Dalam ayat dan hadits sebelumnya, istilah "Hizb" dan "Firqah" mengacu pada kelompok yang terpecah belah. Allah menegaskan bahwa setiap kelompok bangga dengan kelompoknya sendiri; Sudah sewajarnya kebiasaan kelompok-kelompok yang terpecah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menganggap serius legitimasi dan kebenaran kelompoknya. Dari konteks integrasi umat (Ukhuwwah Islamiyah) yang dijuluki Ummatan wa hidah, di sinilah muncul perpecahan dari kehendak Islam. Hanya ada satu). Penggunaan istilah “Hizb” dalam al-Qur'an cenderung membedakan antara yang benar dan yang salah, seperti dikemukakan oleh Sa'id Hawa. Umat yang mengikuti semua perintah Allah dan mengabaikan semua larangan-Nya, mencontohkan kebenaran yang diwakili oleh istilah "Hizb Allah", yang dapat diartikan sebagai "Golongan Allah". Sedangkan Hizb asy-Syaitan, yang diterjemahkan menjadi "Kelompok Setan", adalah sekelompok individu yang menentang Allah, menjalankan larangan-Nya, dan menerima ajakan setan.

Partai politik adalah organisasi yang mengikat anggotanya pada kebijakan partai dan bertujuan untuk memenangkan pemilihan guna menambah jumlah kursi di parlemen. Ada isu-isu penting yang perlu dibahas dalam hal ini; jika partai memenangkan mayoritas mutlak atau mayoritas di parlemen, mereka akan membentuk pemerintahan negara sesuai dengan kehendak partai. Keberuntungan bisa berpihak pada umat Islam jika partai bernuansa Islam memosisikannya sebagai partai Islam yang menempatkan syariat Islam di atas segalanya bagi konstituenya. Namun, meski bukan partai kafir, jika partai yang memenangkan pemilu bukan partai Islam dan tidak menekankan syariat Islam, maka niscaya umat Islam di wilayah mayoritas akan mengalami malapetaka dan bencana politik yang paling besar.³⁵

Perjalanan politik Indonesia dari kacamata realita saat ini saling bersinggungan. Islam di Indonesia merupakan agama besar, namun dalam aktualnya Islam masih awam pada saat

³⁵ Adan, H. Y. (2014). Partai Politik Dalam Perspektif Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 3(1), 496.

pelaksanaan kampanye dalam pemilu. Analisis aktual (Tahlil al-ahwal al-mu'asir) atas kejadian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama adalah dari pemikiran masyarakat saat itu. Penjelasannya adalah spekulasi tentang partai politik yang sekular dan wathaniyah (satu kesatuan dalam berbangsa). Alasan pertama dampak dari pemikiran tersebut berarti mengacu pada aturan semasa peninggalan kolonial Belanda serta adanya kesenjangan ekonomi yang lancip kebawah dan tumpul keatas, kekayaan alam juga akan diakui oleh asing atas persetujuan dari para anggota partai yang duduk di kursi parlemen.

Kedua, menurut Jefery Giovanni menjelaskan bahwa partai-partai Islam yang ada di Indonesia tidak memiliki konsep (fikroh) yang jelas dan tegas. Dalam kasus tertentu mengenai fenomena gender seorang pemimpin negara adalah perempuan, tanggapan kebanyakan partai-partai Islam hanya menjelaskan bahwa hal tersebut hanya mengenai fiqih dan diserahkan bagaimana rakyatnya. Bertumpu pada syariah Islam yang menjelaskan bahwa "Islam adalah agama yang adil, bebas dan setara." Dengan demikian, maka partai politik Islam tidak memiliki partai umum lainnya.

Ketiga, dampak lainnya adalah rakyat memiliki andil bersuara hanya terlihat dalam pemilu saja, karena partai-partai yang mampu berkuasa hanya partai yang menang dalam pemilu dan duduk dalam parlemen. Keempat, adanya metode yang tidak jelas. meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan sebagian besar penduduk beragama Islam, namun harus ditekankan bahwa negara Indonesia adalah plural. Adanya koalisi yang kurang sehat seperti antara partai politik Islam dan partai politik nasional yang anti Islam belum lagi pada daerah tertentu adanya partai politik Islam yang berkoalisi dengan partai kristen yang jelas saling bersimpangan. Kelima, hubungan antar anggota partai yang hanya sekedar kepentingan partai, tentunya hal tersebut memberi dampak dalam hubungan antar anggota dalam satu partai tidak kompak. Dan yang terakhir adalah kurangnya figur, bahkan perilaku sebagian anggota/pengurus partai terkhusus partai Islam tidak mampu mencerminkan sikap Islam sesungguhnya. Seperti aliran dana DPR yang belum memiliki kejelasannya yang bahkan diterima juga oleh para anggota partai terkhusus Islam yang jelas terdapat aturan dalam ajaran ajaran Islam yang mengatakan hukum haram

pada suap (risywah). Aktualisasi mengenai partai pada modern ini memang bukan mencerminkan kejelasan pada sarekat Islam, yang bahkan bersimpang dengan Islam hal tersebut memang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang sekuler dimana pemerintahannya bukan hanya bertumpu pada satu topik pemikiran seperti Islam melainkan pada kembalinya Indonesia yang plural.³⁶

7. Sejarah Partai Politik di Indonesia

Budi Utomo adalah asal mula adanya partai politik di Indonesia. Pada awalnya, Budi Utomo adalah kelompok yang beranggotakan para ulama dari perkumpulan sosial, bisnis dan pendidikan. Partai politik di Indonesia pertama kali muncul setelah Budi Utomo, adalah Indische Partij dan Sarekat Islam. Organisasi Budi Utomo menjadi terkendala karena adanya kedua partai tersebut. Hal itu karena setelah adanya dua kelompok tersebut, anggota Budi Utomo tidak segan meninggalkan Budi Utomo dan masuk kedalam dua gerakan tersebut. Pada akhirnya, Budi Utomo mengarahkan kegiatannya untuk terjun ke dalam perpolitikan, mengikuti tiga organisasi yang sebelumnya juga telah terlahirnya organisasi baru yaitu Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan oleh Orang Belanda di Semarang pada tahun 1914. Adapun tujuan dari berdirinya ISDV yaitu untuk memperkenalkan ajaran Marxisme di Indonesia, hingga tahun 1920 berubah dari ISDV ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketua dan Wakil Ketua PKI sendiri merupakan tokoh yang berasal dari partai Sarekat Islam yaitu Semaun dan Darsono. Sedangkan Sarekat Islam sendiri menjadi terbelah menjadi dua kubu yaitu kubu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Adanya perbedaan antara Budi Utomo dan Sarekat Islam, dimana Sarekat Islam memiliki pergerakan untuk memajukan bidang perekonomian rakyat dan Islam dengan atas nama Sarekat Islam, berbeda dengan Budi Utomo yang revolusioner dan nasionalis.

Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia, Patta Indonesia dan partai-partai lainnya bermunculan setelah Budi Utomo memproklamkan kegiatannya kedalam politik.

³⁶ Kuliah Pemikiran Islam, “Partai Politik dalam Pandangan Islam”, <https://kuliiahpemikiran.wordpress.com/2010/06/30/partai-politik-dalam-pandangan-islam/>, 14 Maret 2023.

Muhammadiyah telah menyatakan bukan partai politik, meskipun memiliki ikatan dengan organisasi politik Islam. Akan tetapi, maksud utamadari didirikannya Muhammadiyah yang dicetuskan oleh K.H. Ahmad Dahlan akan membawa umat Islam kembali ke sumber Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan organisasi Muhammadiyah adalah dengan adanya organisasi ini mampu mendorong kaum muslim untuk memperjuangkan dan mampu mengamalkan keislamannya. Berbeda dengan tahun 1920-an-1930-an dan masa kependudukan penjajah Jepang pada 1942-1945. Partai politik pada saat itu menghadapi kesulitan untuk melaksanakan perannya. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Jepang tidak memberikan izin partai politik untuk berpolitik. Karena Jepang saat itu fokus mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan memperkerjakan paksa rakyat Indonesia dengan kata lain Romusa. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, yang merupakan titik awal untuk negara Indonesia untuk membangun cita-cita dan landasan negara. Pendirian dasar negara menimbulkan perselisihan hebat diantara berbagai partai politik. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan ideologi yang kuat diantara semua partai politik yang dibentuk sebelum kemerdekaan Indonesia.³⁷

Pada masa kemerdekaan polarisasi Indonesia semakin meningkat masa ketika Indonesia memulai pemerintahan dengan menggunakan demokrasi liberal. Tahun 1955, pemilihan umum (pemilu) pertama Indonesia dilakukan, ada banyak partai yang bermunculan, sekitar lebih dari 30 partai yang muncul. Namun partai yang berhasil hanya mendapatkan empat pemenang kontroversial yang berasal dari dua kelompok besar partai politik yang sebelumnya telah ada sebelum Indonesia merdeka. Keempat partai yang berhasil menang adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI. PNI dan PKI yang merupakan memiliki ideologi dari Syarikat Rakyat, sedangkan Masyumi dan NU mengusung ideologi Syarikat Islam. Polarisasi partai politik di Indonesia semakin kompleks, pemilu kedua baru dapat dilaksanakan pada tahun

³⁷ Labolo, Muhamdam dan Teguh Ilham, "Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)", (PT. Rajagrafindo Persada:2015):2.

1971. Awal kemerdekaan Indonesia, terjadi polarisasi politik di Indonesia terlebih Indonesia saat itu mengambil demokrasi liberal dalam perjalanan pemerintahannya. Pemilu pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1955, muncul banyan partai yang bermunculan saat itu, sekitar lebih dari tiga puluh partai yang lahir. Akan tetapi hanya ada empat partai yang mampu memenangkan pemilu yang merupakan keempat partai tersebut berasal dari dua kelompok besar yang sebelumnya telah ada sebelum Indonesia merdeka. Keempat partai tersebut adalah PNI, NU, Masyumi dan PKI. Empat partai tersebut berdiri dari dua ideologi, PNI dan PKI berasal dari ideologi syarekat rakyat sedangkan Masyumi dan NU berasal dari ideologi syarikat Islam. Polarisasi di Indonesia semakin kompleks seiring berjalannya waktu yang berdampak pada pemilu kedua baru terlaksana pada tahun 1971.

Ketika Indonesia di bawah Soeharto atau sering disebut Orde Baru, jika dilihat dari kesuksesan partai politik dari pemilu 1955 yang hanya memenangkan empat partai, pemilu 1971 hanya ada sembilan partai yang ikut serta. Kesembilan partai tersebut adalah PNI, NU, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, PSII, Parmusi, Partai Kristen, dan Partai Murba serta terdapat Golkar yang mampu mencapai kemenangannya dalam pemilu yang meskipun saat itu tidak mau mengakui keberadaannya sebagai partai politik. Dari dulu dari pemilu (1977) sampai berakhirnya pemilu tahun 1997, Hanya ada 3 partai politik di Indonesia yaitu PPP, Golkar dan PDI. Jika dilihat dari polarisasi ketiga partai tersebut dikelompokkan berdasarkan klasik Syarikat Islam dan Syarikat Rakyat, tapi Golkar adalah satu-satunya mayoritas saat itu. Di era Orde Baru, kampanye anti-kiri dan anti-kanan sering disuarakan.³⁸ Setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto atau disebut dengan berakhirnya Orde Baru menuju Reformasi saat ini sering sekali partai politik bermunculan setelah mendapatkan kebebasan demokrasi di Indonesia.

8. Fungsi Partai Politik

Partai politik adalah sebuah organisasi yang memiliki sistem ideologi atau dibentuk dengan tujuan tertentu. Partai

³⁸ Fautanu, I. (2020). *Partai Politik di Indonesia*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

politik terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tujuan dan ideologi yang sejalan dengan tujuan utama untuk memperoleh atau merebut kekuasaan dalam kedudukan politik. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh melalui kursi parlemen dengan menjalankan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, fungsi partai politik meliputi : pertama, memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum untuk membantu mereka menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat dan bernegara; kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; ketiga, menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik rakyat untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; keempat, memfasilitasi partisipasi warga negara Indonesia dalam politik; dan kelima, melakukan rekrutmen politik melalui proses pengisian jabatan politik secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Partai politik memiliki empat fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Partai politik untuk sarana pendidikan politik. Pendidikan demokrasi merupakan salah satu jenis pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan jati diri bangsa, dan sasaran sasarnya adalah pelajar. Peserta didik dapat belajar demokrasi dengan baik melalui partai politik disebabkan partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat untuk keberlangsungan negara Indonesia, terkhusus Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar pendukung demokrasi. Dari partai politik para peserta didik diharapkan memperoleh pengetahuan, ketrampilan, sikap melalui nilai-nilai yang bersangkutan dengan demokratisasi. Pendidikan demokrasi dapat tersalur melalui partai politik karena partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat ke pemerintah, pendidikan yang didapat oleh para peserta didik adalah Indonesia sebagai negara demokrasi, maka setiap kebijakan yang berjalan di Indonesia bukan semata-mata diputuskan rakyat sendiri melainkan adanya ikut campur rakyat melalui partai politik.
- b. Partai politik sebagai pembangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Partai politik merupakan sekelompok orang yang

memiliki tujuan sama, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan melalui legislatif. Partai politik tidak mampu menduduki kursi parlemen jika tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Rakyat sendiri akan menentukan suaranya dalam pemilu, dengan alasan tertentu rakyat akan memilih partai politik salah satunya mungkin adanya kesamaan ideologi yang terdapat dalam partai sehingga partai politik tersebut tepat untuk dipilih. Setiap partai politik tentunya memiliki ideologinya masing-masing, maka dengan perbedaan tersebut bukan menjadi alasan bentrok untuk rakyat yang fanatik terhadap partai politik. Selain itu, partai politik juga sebagai wadah aspirasi rakyat untuk keberlangsungan kemajuan negara. Melalui partai politik pembangunan negara agar lebih maju dapat dilaksanakan dengan persatuan dan kesatuan masyarakat serta saling mendukung dengan ikut bersuara dalam membangun negara melalui partai politik.

- c. Partai politik sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi rakyat dalam menetapkan kebijakan negara. Fungsi partai politik adalah sebagai wadah aspirasi rakyat, maka partai politik harus mampu menjadi kepercayaan rakyat. Partai politik merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan melalui kursi parlemen tentunya harus mampu menjadi penyerap, penghimpun dan penyalur suara rakyat untuk membangun negara, setelah mendapatkan kepercayaan dari rakyat sehingga mendapatkan banyak dukungan untuk duduk di kursi parlemen.
- d. Partai politik menjadi rekrutmen politik melalui pengisian jabatan pemerintahan melalui cara demokratis yaitu pemilu. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik haruslah dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dengan mempertimbangkan kredibilitas sehingga anggota yang terpilih benar-benar yang terbaik dengan kredibilitas yang mumpuni.

9. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah cara yang demokratis untuk membentuk pemerintahan atau memilih perwakilan untuk menduduki kursi pemerintahan yang merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat dalam bernegara. Dapat dikatakan bahwa pemilu adalah sarana untuk rakyat

dalam menentukan wakil-wakil di lembaga pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Definisi pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Pemilu merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun pelaksanaan Pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat Indonesia yang demokratis, rakyat bukan hanya berperan mengikuti pemilu saja, melainkan ikut aktif dalam memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian aspirasi rakyat dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, media massa atau berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.³⁹

Pemilu adalah sebuah cara untuk mengajak rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retrorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Meski agitasi dan propaganda dilarang dalam negara demokrasi, nyatanya kedua cara tersebut sering dilakukan saat pemilu oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Konsep pemilu sendiri adalah sarana sebagai pengamalan kedaulatan rakyat melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang berada dalam parlemen maupun pemerintahan.⁴⁰

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dalam implementasian secara tidak langsung seperti ketika Baiat al-Nuqaba (wakil-wakil suku), yaitu ketika Kaum Anshar membaiaat Nabi Muhammad SAW di Aqabah, saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian sendiri, tidak berbuat dusta yang*

³⁹ Herry Febriadi, “Implementasi Uu No 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018): 50.

⁴⁰ Cecep Suryana, *Komunikasi Politik (Teori Dan Praktik)*, 2nd ed. (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019): 45.

kalian *ada-adakan sendiri, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barangsiapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Barangsiapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu ia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Barangsiapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, Allah menyiksanya. Dan jika menghendaki, Allah akan mengampuninya.*" Lalu kami pun berbaiat kepada beliau" (HR. Bukhori, no. 18 dan Muslim no. 1709).

Kisah selanjutnya datang dari utusan Hawzan sebagai muslim dan memberikan baiat. Hawzan memohon meminta harta kaum muslim yang telah dirampas saat perang untuk dikembalikan. Rasulullah pun meminta ijin kepada kaum muslim, dan mendapatkan jawaban dari para kaum muslim untuk diridhakan. Namun Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan, melainkan menyuruh kaum muslim untuk segera menyelesaikan masalah agar ia tahu siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju hingga masalah tersebut diadakan kepada wakil yang telah ditunjuk. Dari kisah keduanya dapat disimpulkan merupakan gambaran pemilu pada saat zaman Rasulullah SAW dimana beliau memberikan hak kepada rakyatnya untuk memilih wakil yang mampu mewakili mereka.

Cara pemilihan kepala negara dalam Islam masuk kedalam masalah-masalah dengan bentuk politik konstitusional yang sama-sama dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan masyarakat serta perkembangan zaman. Dasar yang dalam masalahnya adalah bahwa orang-orang memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin. Sementara Ahlul Halli Wal 'Aqdi yang menjadi wakil dari pemimpin, dengan jumlah kecil dari rakyatnya namun memiliki kapabilitas untuk menyandang tanggung jawab memilih pemimpin. Dapat disimpulkan bahwa dalam pemerintahan sejak aman Rasulullah, sistem pemerintahannya diserahkan kepada rakyat karena rakyat memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur dan kewenangan dalam memilih pemimpin mereka.⁴¹

⁴¹ Asy'ari, A. S. N. A. N. (2021). *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam*

10. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebuah partai politik yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 atau 29 Robiul Awal 1419 di Jakarta oleh para kiai Nahdlatul Ulama, yaitu K.H. Munasir Ali, K.H. Ilyas Ruchiyat, K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. A. Mustofa Bisri dan K.H. A. Muhiit Muzadi. PKB didirikan sebagai bentuk tanggung jawab para kiai yang melihat bahwa perkembangan bangsa tidak mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. PKB juga berfungsi sebagai wadah bagi kaum Nahdliyyin untuk menyampaikan aspirasi politik mereka.⁴²

PKB, partai yang meskipun berasal dari kalangan NU, namun tidak dirancang sebagai partai yang memposisikan agama sebagai ideologi atau lebih spesifik sebagai partai Islam. PKB, seperti yang tercantum dalam Mabda Syiasi yaitu sebagai partai yang terbuka dalam arti lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang tercermin dalam visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Islam yang dianut oleh PKB adalah Islam Moderat dan inklusif yang menjadi dasar PKB sebagai partai yang terbuka. Kehadiran PKB merupakan kelanjutan dari tradisi pemikiran dan gerakan NU yang berlandaskan pada Islam moderat dan keindonesiaan yang multikultural. Secara ideologi, PKB tetap konsisten memegang ideologi terbuka dan inklusif sejak awal kelahirannya hingga empat kali pemilu. dalam praktiknya, PKB melibatkan kalangan non Muslim dalam struktur partai dan calon anggota legislatif. Konsistensi dan komitmen PKB ini memastikan bahwa PKB dapat memberikan landasan bagi pelebagaan partai dalam aspek ideologi.⁴³

Perspektif Siyasa Dusturiyah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)(2017): 37.

⁴² Ridoi, “*Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid Di Partai Kebangkitan Bangsa)*.”(Repositori Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016):23.

⁴³ Esty Ekawati, “Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009,” *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2016): 57.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha peneliti dalam mencari perbandingan yang kemudian untuk mendapatkan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, selain itu juga penelitian terdahulu mampu menjadi bukti keaslian dari hasil yang diteliti. Pada bagian ini peneliti berusaha mencantumkan beberapa ringkasan dari hasil penelitian terdahulu yang masih terkait dengan yang penulis kaji. Beberapa penelitian terdahulu dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang pertama berjudul “Eksistensi Partai Islam Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Mamasa” dari Maria Fransiska Ignasia. Penulis menggunakan teori mengenai partai islam di Indonesia, dan pembahasan selanjutnya mengenai tipologi partai sampai pada perilaku pemilih dari sisi sosiologi, psikologis sampai pada pendekatan rasional. Memiliki kesamaan yang membahas tentang eksistensi partai di suatu daerah, perbedaan dari tulisan ini adalah membahas eksistensi partai politik Islam secara umum. Dari penulisan tersebut belum dijelaskan tentang teori eksistensi karena penjelasan mengrucut kepada sikap pemilihnya.⁴⁴
2. Penelitian yang selanjutnya adalah dari M. Ridoi yang berjudul “Kekuatan Figur dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa)”. Penelitian tersebut memberi konsep, teori dan urgensi figur dalam partai politik. Terkhusus yang dijelaskan oleh peneliti adalah partai PKB yang sebelumnya salah satu pendirinya adalah Abdurrahman Wahid yang mampu membawa nama PKB masih dikenal hingga saat ini. Dijelaskan bahwa peran figur memiliki peran penting dalam mendorong nama partai bahkan tetap bertahan setiap pelaksanaan pemilu. Kesamaan dalam penelitian ini adalah tentang kemenangan PKB, memiliki perbedaan karena dalam penelitian ini memfokuskan kemenangan PKB dipengaruhi oleh peran figur seorang Gus Dur.⁴⁵

⁴⁴ Maria Fransiska Ignasia, “Eksistensi Partai Islam Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Mamasa” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

⁴⁵ Ridoi, “Kekuatan Figur Dalam Partai Politik (Studi Terhadap Abdurrahman Wahid Di Partai Kebangkitan Bangsa).” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2016)

3. Skripsi mengenai “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Islam terhadap Partai Politik Berasas Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kebumen pada Pemilu 2014)” yang ditulis oleh Dawud. Penulis menjelaskan mengenai teori Sejarah partai politik di Indonesia dan perjalanan partai politik Islam dalam perjalanan pemilu di Indonesia. Dalam penulisan ini mengarah kepada perjalanan partai politik Islam dalam pemilu. Memiliki kesamaan karena tentang pembahasan partai politik Islam dan salah satu strategi partai politik dalam meraih kemenangan pemilu, memiliki perbedaan dalam hanya menjelaskan satu strategi partai politik yaitu mempengaruhi masyarakat. Kelemahan dari penelitian tersebut hanya membahas bagaimana efektifitas partai politik bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.⁴⁶
4. Penelitian Muhammad Gumilang Bagaskara dengan judul “Persepsi Masyarakat Surakarta Terhadap Partai-Partai Islam dan Partai Nasional di Era Reformasi (Studi Deskriptif Pemilihan Umum Tahun 2019 di Surakarta)”. Menjelaskan mengenai persepsi dan komunikasi politik. Dari skripsi tersebut didapat pemahaman mengenai bagaimana persepsi masyarakat sangat terpengaruh oleh bagaimana komunikasi politik yang harus dapat dimanfaatkan baik oleh para anggota politik sehingga mampu memberi rasa kepercayaan kembali dari partai politik. Memiliki kesamaan dalam membahas salah satu strategi partai politik dalam mempertahankan eksistensinya yaitu dengan strategi komunikasi sehingga mampu memberi partai politik rasa kepercayaan dari masyarakat. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan tulisan karena memiliki pembahasan antara partai politik Islam dan partai politik Islam. Kelemahan dari penelitian ini adalah penjelasan mengenai persepsi masyarakat secara umum, belum mengenai spesifik bagaimana dengan partai politik Islam dan nasional yaitu penjelasan mengenai partai politik baik Islam maupun nasional sama-sama berkontribusi ke partainya sendiri bukan rakyat.
5. Penelitian milik Artis yang berjudul “Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang

⁴⁶ Dawud, “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Partai Politik Berasas Islam” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

bagaimana partai politik yang lahir dari pemikiran Belanda sampai penjelasan mengenai perjalanan Pemilu di Indonesia. dijelaskan juga bagaimana demokrasi di Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan rakyat sehingga mampu melahirkan partai baru di setiap pelaksanaan Pemilu. Sama-sama membahas mengenai keberadaan partai politik dan perjalanan pemilu di Indonesia, perbedaannya adalah partai politik secara umum. Kelemahan dari penelitian ini adalah belum menjelaskan mengenai strategi partai politik sehingga mampu mempertahankan eksistensinya.⁴⁷

C. Kerangka Berpikir

Pemilu merupakan salah satu ajang dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis, dilakukan secara adil, jujur, umum, bebas dan rahasia. Pemilu juga menjadi wadah untuk partai politik dalam meraih kekuasaan baik secara nasional maupun regional (daerah). Partai politik tentunya harus mampu menentukan strategi dalam mempertahankan eksistensinya agar dapat maju ke kursi parlemen. Secara umum paling mudah diidentifikasi yang mampu mempengaruhi keberadaan partai sehingga masih eksis adalah menggunakan strategi kaderisasi dan sayap partai politik. Strategi pengkaderan mampu mendukung keberadaan partai karena partai tentunya perlu regenerasi sehingga anak muda yang digadang sebagai penerus bangsa mampu melanjutkan jejak juang partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat. Selain itu ada juga strategi sayap partai politik yang tentunya mampu menjadi kuatnya partai tetap eksis, karena dengan adanya organisasi di bawah naungan partai mampu menjadi pendukung partai selain itu dengan adanya sayap partai mampu menjadi komunikator yang mempermudah rakyat menyalurkan aspirasinya.

Dalam mempertahankan eksistensinya, PKB dengan strategi dalam pemilu 2019 di Kudus terkhusus Kecamatan Jekulo dimana wilayah Jekulo mampu mendulang suara PKB terbanyak di Kudus yaitu Strategi Komunikasi, Strategi Kaderisasi dan Strategi Sayap Partai Politik. Dari ketiga strategi tersebut didapat perilaku pemilih sehingga mampu menunjukkan bagaimana perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Jekulo. Untuk jelasnya penjelasannya:

⁴⁷ Artis, "Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia.", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 9, No. 1, (2012): 59.

